

MODEL MANAJEMEN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SDIT AL HARAKI DEPOK JAWA BARAT

Muhamad Asep Awaludin
SDIT Al Haraki Depok
e-mail: asepu485@gmail.com

ABSTRAK

Banyak dijumpai kasus perilaku perundungan yang dilakukan oleh peserta didik kepada temannya, yang mengakibatkan korban perundungan tersebut mengalami trauma sehingga tiba-tiba tidak mau pergi ke sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi sebab terjadinya perilaku perundungan masih sering terjadi, dan bagaimana model manajemen pencegahan perundungan dilingkungan pendidikan sekolah dasar tepatnya di SDIT Al Haraki Depok Jawa Barat yang masih dijumpai beberapa indikasi kasus perundungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang juga didukung oleh data-data lapangan melalui wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa, sebab terjadi perundungan di SDIT Al Haraki adalah masih ada beberapa guru yang belum menyadari bahwa sikap keseharian yang menganggap remeh dalam tutur kata dan respon yang mereka berikan terhadap kenakalan (perilaku jahil) antar siswa di sekolah secara tidak langsung mentrigger terjadinya perundungan. Adapun dari aspek manajemen sekolah, ditemukan bahwa sudah ditetapkan kebijakan-kebijakan yang sinkron dengan peraturan-peraturan di setiap kelas, sehingga tidak membingungkan antara sebagian siswa dan juga guru dalam penerapannya. Selain itu juga diciptakan beberapa program baru bagi siswa-siswi yang bertujuan untuk menyibukkan mereka dengan kegiatan yang bermanfaat yang mampu membangun karakter islami yang terintegritas dalam diri para siswa, sehingga siswa menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri dalam menjalani peran sebagai siswa yang baik di sekolah dan di lingkungan manapun mereka berada.

Kata Kunci: *Model Manajemen, Pencegahan, Perundungan*

Abstract: *There are many cases of bullying behavior perpetrated by students towards their friends, resulting in the victim being traumatized so that they suddenly don't want to go to school. This study aims to observe the causes of bullying behavior that still often occur, and how the management model for preventing legislation in elementary school education, to be precise at SDIT Al Haraki Depok, West Java, is where there are still several indications of cases of bullying. This research is a descriptive qualitative research which is also supported by field data through interviews. This study found that the cause of bullying at SDIT Al Haraki was that there were still a number of teachers who did not realize that everyday attitudes that belittled their speech and the responses they gave to misbehavior among students at school indirectly triggered bullying. As for the aspect of school management, it was found that policies had been established that were in sync with the rules in each class, so that there was no confusion between some students and also teachers in their application. Prevention of cases of bullying is carried out with the strategy of creating several new programs for students that aim to keep them busy with useful activities that are able to build an integrated Islamic character in students, so that students become strong and independent individuals in carrying out their role as good students at school and in any environment they are in.*

Keywords: *Management model, prevention, bullying*

PENDAHULUAN

Sekolah adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan usaha dalam bidang pendidikan baik negeri maupun swasta. Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang peran dan tugas dalam memanusiaikan manusia.¹ Oleh sebab itu setiap manusia membutuhkan pendidikan karena memberikan landasan untuk mewujudkan potensi diri

¹ I Ketut. Sudarsana, "Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Desentralisasi Pendidikan Nasional", *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya* 1.1., 2018.

dan membangun rasa diri yang kuat yang diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan luas dan berpikiran terbuka. Sebagaimana ditegaskan dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bahwa mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak yang cerdas, akhlak mulia dan kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Dalam menjalankan pendidikannya, lembaga pendidikan tidak hanya berpatok pada lembaga formal saja, akan tetapi juga pada lembaga non formal. Salah satu formal yang menjadi dasar fondasi dalam mencerdaskan, membentuk spritualitas dan akhlak yaitu sekolah dasar.

Sekolah atau madrasah menjadi lembaga yang di dalam digunakan dalam rangka menuntut ilmu dan pengembangan karakter siswa. Siswa tingkat SD adalah mereka yang sedang melalui tahapan perkembangan anak dan memasuki masa remaja awal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus menjadi lingkungan yang aman, damai, tenteram dan nyaman bagi perseeta didik untuk belajar. Tentu lembaga sekolah harus memberikan kedamaian bagi perserta didik. Hal sebagaimana pendapat Wiyani bahwa sekolah yang damai memberikan 9 (sembilan) kriteria, yaitu "bebas dari kekacauan dan kejahatan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan, perhatian dan kasih sayang, kerjasama, persahabatan, ketaatan pada aturan, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan".

Dengan demikian para peserta didik di sekolah akan dibentuk dan dididik agar menjadi manusia yang baik, berilmu, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional, "yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".³ Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mulia ini, tentu upaya yang perlu dilakukan oleh para pendidik adalah bagaimana setiap peserta didik itu mampu mengenali dirinya, lingkungannya secara positif, untuk dapat mengembangkan dirinya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang perlu dikembangkan pada peserta didik tidak hanya aspek kecerdasan akademiknya saja, namun meliputi aspek yang lainnya seperti spiritual keagamaan, akhlak, sosial, moral, pengendalian diri, kepribadian, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan semua ini, peran pendidik sangat diharapkan, apalagi untuk kondisi sekarang, zaman semakin maju, kekerasan merajalela, dan berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang sering kita lihat di media-media, baik media cetak maupun elektronik. Kita masih mendengar pada berbagai tingkat pendidikan masih saja terjadi berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik kita, misalnya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang ada.

² Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan." 2021.

³ Indonesia, Undang-Undang Republik, and R.I. Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2003, h. 34.

Berbagai bentuk perilaku menyimpang Menurut M. Sattu Alang adalah tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas sosial, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, hukum formal atau bertentangan dengan nilai-nilai agama.⁴

Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang semakin marak terjadi adalah perundungan. Perilaku menyimpang ini tidak hanya dilakukan oleh siswa-siswa SMP atau SMA saja, tapi juga oleh anak-anak SD. Kata perundungan mungkin belum terlalu familiar bagi masyarakat Indonesia, tetapi kasus perundungan banyak terjadi di Indonesia. Perundungan adalah terjemahan dari kata *bullying* dalam Bahasa Inggris. Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang ditujukan untuk menyakiti, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain karena adanya ketidakseimbangan kekuatan, serta dilakukan berulang kali atau berpeluang dilakukan secara berulang kali.

Perundungan merupakan permasalahan serius yang dihadapi anak-anak di dunia, di mana angka prevalensi kejadiannya tergolong tinggi. Hal ini sangat menyedihkan, mengingat anak seharusnya mendapatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan bermainnya. Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Th. 2002 tentang perlindungan anak, bab III mengenai hak dan kewajiban anak mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Namun fakta menunjukkan kebalikannya, perundungan terhadap anak yang terjadi di Indonesia bukan fenomena yang baru baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, dan lingkungan bermain anak.

Kekerasan dapat terjadi kapan dan di mana saja. Kekerasan dapat terjadi di rumah tangga, bahkan dalam dunia pendidikan. Bahkan sering kali sulit mencegah agar tindak kekerasan tidak menyebar. Kekerasan juga bisa disebabkan oleh banyak hal, penindasan dianggap sebagai hal yang wajar dan harus dibalas dengan hal yang serupa tindakan ini tidak akan memutus rantai kekerasan itu sendiri, tapi akan semakin menyebar dan subur.

Hasil survey *Children's Worlds* di Indonesia menunjukkan bahwa angka kejadian perundungan terhadap siswa sekolah dasar di 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat tergolong tinggi. Sebanyak 52.5% siswa sekolah dasar mengalami perundungan fisik dengan dipukul oleh anak lain di sekolah setidaknya satu kali dalam satu bulan terakhir; sebanyak 60.6% siswa sekolah dasar mengalami perundungan verbal dengan diejek atau dipanggil dengan julukan buruk oleh anak lain di sekolah setidaknya satu kali dalam satu bulan terakhir; dan sebanyak 49.6% siswa sekolah dasar mengalami perundungan psikologis dengan dikucilkan oleh anak lain di kelas setidaknya satu kali dalam satu bulan terakhir.

Selanjutnya, berdasarkan data *International Center for Research on Women* (ICRW) tahun 2015, sebanyak 84 persen siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sebanyak 45 persen siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Sebanyak 22 persen siswi menyebutkan bahwa guru dan petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Selain itu, 75 persen siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. Data *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), menyebutkan bahwa 50 persen anak mengaku pernah

⁴ Sattu Alang M., *Kesehatan Mental dan Terapi Islam*, cet. III; Makassar: Berkah Utami, 2006, h. 44.

⁵ *Amandemen UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2015, h. 65.

mengalami hukuman fisik terhadap anak-anaknya. Bahkan, sekitar satu dari empat mengaku menggunakan hukuman fisik yang berat. Hukuman fisik adalah hukuman yang paling lazim dilakukan di 56 persen sekolah yang diwawancarai. Tindakan tersebut, dilakukan Guru karena mereka mengakui tidak tahu alternatif lain untuk mendisiplinkan murid-murid mereka, meski mereka mengetahui tentang dampak buruk dari hukuman fisik tersebut.⁶

Dari uraian di atas maka bisa dicermati bahwa angka perundungan dari tahun ke tahun cenderung tinggi dan itu selalu terjadi di belahan dunia manapun.⁷ Jadi, bisa dikatakan, tindakan perundungan telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi sekolah atau kampus kepada pelajar baru selalu "dibumbui" dengan tindakan kekerasan (premanisme) dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara pelajar senior dengan pelajar junior. Namun, hal yang terbentuk justru sebaliknya, hubungan antara pelajar senior dan junior sangat berjarak dan tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian dan dendam menjadi tradisi dan warisan pada setiap generasi berikutnya.⁸

Perilaku perundungan sebagai bentuk kekerasan di institusi pendidikan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik antar teman, antar siswa, antar geng di sekolah, kakak kelas bahkan guru. Bahkan terkadang terjadi sangat halus sehingga kita tidak sadar telah menjadi korbannya. Bahkan, bisa jadi pelaku perundungan sendiri tidak menyadari bahwa dia telah melakukan tindakan perundungan. Lokasi terjadinya mulai dari ruang kelas, toilet, kantin, halaman, pintu gerbang, bahkan di luar pagar sekolah. Akibatnya, sekolah bukan lagi menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa, melainkan justru menjadi neraka, tempat yang menakutkan dan membuat trauma.⁹

Beberapa hasil penelitian internasional mengungkapkan bahwa perundungan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan anak. Mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada kemampuan akademik, psikososial, dan kesehatan mental. Menjadi korban perundungan mempengaruhi rasa keberhargaan diri anak dan memberikan dampak serius bagi perkembangan mereka meningkatkan masalah tingkah laku dan menurunkan perilaku prososial. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban perundungan memiliki kondisi *well being* yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak menjadi korban perundungan.

Individu yang pada masa anak-anak yang menjadi korban perundungan dilaporkan mengalami gangguan kecemasan, psikosomatis, dan gangguan depresi ketika dewasa. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Kaminski dan Fang menunjukkan bahwa remaja yang pada masa anak-anak menjadi korban perundungan memiliki 2.4 kali lebih besar peluang

⁶ Andi Hartik, "84 Persen Siswa Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah", diakses pada 20 November 2020, dalam <https://regional.kompas.com/read/2016/11/29/16005801/84>

⁷ Imran, Saiful. "Ciri Program BK yang Efektif dan Efisien". diakses pada hari minggu 24 januari 2021, dalam <https://regional.kompas.com/read/2016/11/29/16005801/84.persen.siswa.indonesia.alami.kekerasan.di.sekolah>.

⁸ Sucipto, "Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya", *Jurnal Psikopedagogia*, Vol. 1, No.1, Juni 2012, h. 5.

⁹ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Childern from School Bulling*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 5

memiliki ide bunuh diri dan 3.3 kali lebih besar peluang melakukan upaya bunuh diri dibandingkan yang tidak pernah menjadi korban perundungan.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tindak agresi di sekolah merupakan suatu ironi karena sekolah seharusnya menjadi tempat terhormat di mana nilai-nilai positif seperti sopan santun, respek antar teman dan warga sekolah lainnya, maupun keterampilan sosial lainnya ditanamkan. Douglas melaporkan bahwa frekuensi terjadinya perundungan dan bentuk agresi lainnya menjadi problem terbesar yang dihadapi sekolah.

Menurut penelitian Hertinjung perilaku perundungan di Sekolah Dasar dapat diklasifikasikan menjadi dua versi, yaitu versi pelaku dan versi korban. Menurut versi pelaku, bentuk perundungan yang paling sering dilakukan adalah perundungan verbal, dan selanjutnya relasional dan fisik. Sedangkan menurut versi korban, bentuk perundungan yang paling sering dialami adalah verbal, fisik dan relasional. Dari penelitian tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan frekuensi bentuk-bentuk perundungan antara versi pelaku dan korban, terutama pada bentuk perundungan fisik dan relasional. Namun, terlepas dari semua perbedaan tersebut, perundungan verbal menjadi bentuk perundungan yang paling sering terjadi dan muncul pada peserta didik di Sekolah Dasar.

Sejalan dengan hasil penelitian Hertinjung, penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di lima provinsi yaitu Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, Bangka Belitung dan Lampung, menunjukkan bahwa 50% siswa SMA, 38,1% siswa SMP dan 49% siswa SD melakukan perundungan dengan alasan pernah menjadi korban.¹⁰ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku ada kecenderungan berantai antar generasi. Faktor penyebab dapat digunakan sebagai dasar untuk intervensi, sehingga sistem peringatan dini sebagai tindakan preventif.¹¹ Agar perundungan tidak berkembang, yang dibutuhkan adalah mekanisme sistem peringatan dini (*early warning system*). Prinsip dasar mekanisme deteksi dini adalah pihak sekolah secara proaktif mendeteksi, memantau, menganalisis, dan menangani setiap benih perundungan sedini dan secepat mungkin.¹²

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perilaku bullying pada siswa disebabkan oleh banyak faktor yaitu diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Verlinden, Herson dan Thomas¹³, Yusuf dan Fahrudin¹⁴, yaitu: faktor individu, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor sekolah, faktor media, dan faktor pengendalian diri. Sedangkan Faktor lainnya disebabkan oleh pola asuh¹⁵, kontrol, iklim sekolah, pola asuh dan tipe kepribadian dan paparan kekerasan.¹⁶

¹⁰ Kurniasari, A. dkk., "Prevalensi Terhadap Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia", *Jurnal SOSIO KONSEPSIA* Vol. 6, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2017.

¹¹ Suyono H & Suryanto, "Pengembangan Model Sistem Peringatan Dini Konflik Menggunakan Prediktor Identitas Sosial". *Humanitas, Jurnal Psikologi Indonesia*, 14 (1), h. 66-77.

¹² Hari Harjanto Setiawan, Pengembangan Sistem Peringatan Dini Perundungan pada Pelajar Di Kota Pangkal Pinang, *Jurnal SOSIO KONSEPSIA* Vol. 7, No. 02, Januari - April, Tahun 2018, h. 64

¹³ Verlinden, S.H.M dan Thomas, J., "Risk Factors in School Shootings", *Clinical Psychology Review*, Vol. 20 No. 1, h. 6.

¹⁴ Husmiati Yusuf and Adi Fahrudin. "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial." *Jurnal Psikologi Undip* 11.2 2012, h. 3-5.

¹⁵ R., S. Purwatiningsih Fataruba, and Y. Wardan. *Hubungan Pola Asuh Dengan Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Usia Sekolah (6-18 Tahun) di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara*. None, 2009.

¹⁶ Lukitasari, Depi, and Intan Yuliani Pratiwi. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dan Penggunaan Gadget Dengan Perilaku Bullying Pada Remaja." *Jurnal Sehat Masada* 15.2, 2021, h. 313-326. Sari, Popy

Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa perilaku bullying terjadi karena banyak faktor, bukan hanya satu faktor. Salah satu indikasi kuatnya adalah sekolah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mortimore dan Sammons dalam Jones dan Jones bahwa kebijakan dan proses kontrol yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru berperan penting dalam pencapaian keterampilan sosial siswa. Dengan kata lain, sekolah merupakan salah satu lingkungan (milieu) yang berkontribusi besar terhadap munculnya perilaku bullying pada siswa, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pencegahan perilaku bullying siswa dapat dilakukan dari lingkungan sekolah sebagai salah satu penyebab utama.¹⁷

Lebih Lanjut Jones dan Jones menekankan pada lingkungan sekolah, mengutip hasil penelitian yang dilakukan di Johns University Hopkins bahwa teknik manajemen kelas yang efektif pada awalnya kelas (di sekolah dasar) memiliki pengaruh besar pada apakah siswa akan berperilaku buruk pada usia tiga belas tahun. Selain itu, Jones dan Jones juga menambahkan, mengacu pada hasil penelitian Kellam dan rekannya, anak-anak yang sangat agresif yang masuk kelas satu (SD) dengan guru terlatih dalam manajemen kelas tiga kali lebih kecil kemungkinannya untuk terus menjadi agresif ketika mereka berada di kelas delapan dibandingkan anak agresif yang masuk kelas satu dengan pengelolaan kelas yang buruk.¹⁸

SDIT AL Haraki Jawa Barat terhitung sekolah dasar yang cukup bagus di taraf nasional. Ia juga sering mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam hal kebersihan dan kerapian tata Kelola sekolah. SDIT Al Haraki juga menjadi role model bagi sekolah lain disekitar dalam banyak hal positif lainnya. Dari sisi karakter, sekolah ini sangat ini sangat menerapkan disiplin dalam berbagai aspek, lebih dari itu SDIT Al Haraki memiliki banyak program unggulan bagi siswa siswinya. Para siswa siswinya selalu mendapat kejuaraan dalam berbagai bidang olimpiade yang diikutinya. Berdasarkan penemuan awal, di SDIT Al Haraki terdapat beberapa kasus kenakalan anak berupa perundungan yang dilaporkan,¹⁹ dan sampai menyebabkan salah satu siswa tingkat dasar yang menjadi korban perundungan tersebut tidak lagi mau berangkat ke sekolah. Hal ini memunculkan pertanyaan tersendiri, kapan, dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi?, apa saja yang sudah dikerjakan pihak sekolah? Mengapa hal demikian bisa terjadi!

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas menggambarkan eksistensi perundungan dalam dunia pendidikan terutama yang terjadi pada pelajar yang disebabkan oleh berbagai faktor akan membawa dampak buruk bagi korbannya baik secara fisik maupun psikis. Mengingat dampak negatif yang sangat serius yang ditimbulkan akibat menjadi korban perundungan, maka sangatlah krusial untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar dapat menghentikan terjadinya perundungan. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu: Bagaimana dan apa bentuk perundungan yang terjadi di SDIT Al Haraki Depok Jawa Barat? Bagaimana model manajemen pencegahan perundungan di SDIT Al-Haraki Depok Jawa Barat?

Puspita, Sumardi Sumardi, and Sima Mulyadi. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini." *Jurnal PAUD Agapedia* 4.1 (2020), h. 257-170. Rahmat, Stephanus Turibius. "Pola Asuh yang Efektif Untuk Mendidik Anak di Era Digital." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 10.2, 2018, h. 143-161.

¹⁷ Jones, V. dan Jones, L., *Manajemen Kelas Komprehensif*, Edisi ke- 9, Terj. Intan Irawati, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012., h. 12.

¹⁸ Jones, V. dan Jones, L., *Manajemen Kelas Komprehensif*, ..., h. 10.

¹⁹ Wawancara dengan guru kelas 6; ibu Sindy Linda Sari, S.P.d pada tanggal 11 November 2020

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang juga didukung oleh data-data lapangan melalui wawancara. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Pendekatan sosial digunakan untuk mengetahui sebab terjadi perundungan di kawasan sekolah.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pencegahan Perundungan

Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari asal kata '*manus*' yang berarti tangan, dan '*agere*' yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja '*managere*' yang artinya menangani. Manager diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen.²¹ Akhirnya *management* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi *manajemen* atau *pengelolaan*.²²

Menurut Henry L Sisk dalam bukunya "Principles of Management" disebutkan Management is the coordination of all resources through, the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives. Artinya manajemen adalah proses pengkoordinasian seluruh sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²³

Dalam proses pelaksanaan manajemen sekolah, hampir dapat dipastikan akan melibatkan beberapa fungsi-fungsi pokok yaitu: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Menggerakkan) dan *Controlling* (Pengawasan). Paling tidak kelima fungsi tersebut dianggap mencukupi bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya material melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Bentuk Perundungan dan Upaya Pencegahannya di Sekolah

Buku karya David A. Hamburg dan Beatrix yang menyajikan alternatif menarik dalam upaya pencegahan perundungan "*Learning to Live Together: Preventing Hatred and Violence in Child and Adolescence Development*" disebutkan bahwa dalam rangka

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 11

²¹ Bashori Bashori. "Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan." *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 2.2, 2018: 18-32. Lihat juga Juamarniti, Juamarniti, Asriani Asriani, and Nirwana Nasir. "Analisis Peran Manajemen Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di SMKN 7 Bone." *JURNAL MAPPESONA* 2.1, 2019.

²² Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 1. Puji Kusumandari, and Nur Rohmah. "Manajemen ekstrakurikuler Hizbul Wathan untuk membentuk karakter kepemimpinan siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Madrasah* 3.1, 2018, h. 267-278. Bashori, Bashori. "Manajemen Konflik di Tengah Dinamika Pondok Pesantren dan Madrasah." *Muslim Heritage* 1.2, 2016, h. 353-370.

²³ Henry L. Sisk, *South Western, Principles Of Management*, Cincinnati Ohio: Philippine Copyright, 1969, h. 6

pengecahan kekerasan terdapat tiga prinsip utama yakni: 1) Perubahan Sistemik pada Sekolah; 2) Program untuk Siswa; dan 3) Kebijakan Publik. Menurut Hamburg & Beatrix, hal ini sangat penting untuk melakukan upaya penting karena masa sekolah memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan pengaruh baik ataupun buruk.

a. Perubahan Sistemik pada Sekolah

Perubahan di tingkat sistem atau lembaga seperti misalnya kerangka peraturan, kebijakan dan kerangka kondisi yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kebijakan tertentu.²⁴ Perubahan apa yang harus terjadi merupakan indikasi yang menunjukkan pada dimensi isi yang harus dikelola. Penjabarannya dituangkan pada hal-hal yang mencakup kepentingan dari perubahan (*purpose*), tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan (*goals*), dan target atau sasaran-sasaran yang mau dicapai (*objectives*).

Suatu topik kajian perubahan bisa disoroti dari berbagai sisi dan sudut pandang. Lingkup manajemen perubahan menurut Pettigrew dan Whipp mengandung tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi isi (*sasaran-sasaran-objectives*, maksud-*purpose*, dan tujuan-tujuangoals) yang menyangkut pertanyaan Apa?
2. Dimensi proses (implementasi) menyangkut pertanyaan Bagaimana? dan
3. Dimensi konteks (lingkungan internal dan eksternal) yang menyangkut pertanyaan di mana?²⁵

b. Program Pencegahan Perundungan

Ada beberapa program pencegahan perundungan yang dikembangkan oleh beberapa negara. Salah satunya adalah yang dibuat oleh Pemerintah Norwegia melalui *Olweus Perundungan Prevention Program (OBPP)*.²⁶ Program ini dibuat sebagai bentuk tanggapan atas kematian 3 remaja sekolah di tahun 1983 yang membunuh dirinya sebagai akibat perundungan yang terus-menerus dialaminya di sekolah. Menteri Pendidikan Norwegia segera merespon dengan melakukan kampanye berskala nasional untuk menghapuskan kekerasan/perundungan di sekolah melalui program pencegahan perundungan di sekolah yang terkenal dengan nama *Olweus Perundungan Prevention Program (OBPP)*. Pemerintah Indonesia sendiri tidak memiliki program sejenis yang berskala nasional untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perundungan di institusi pendidikan.

c. Kebijakan Publik

Mencegah Perundungan di Institusi Pendidikan Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Indonesia tidak memiliki program yang secara khusus dan berskala nasional seperti yang dilakukan Pemerintah Norwegia, akan tetapi langkah kebijakan yang ditempuh dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan kekerasan dan perundungan, serta perubahan perilaku merupakan salah satu komponennya.

²⁴ Aceng Muhtaram Mirfan, "Manajemen Perubahan Pada Satuan Pendidikan Dasar," *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. XXIII No. 1 April 2016, h. 62.

²⁵ Aceng Muhtaram Mirfan, "Manajemen Perubahan Pada Satuan Pendidikan Dasar," ..., h. 70.

²⁶ Rika Saraswati dan V. Hadiyono, *Tata Tertib Sekolah yang Responsife Antike-kerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Sekolah di Kota Semarang*, Penelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing, 2015, diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

1. Pendekatan Norma Hukum

Upaya pencegahan perundungan di institusi pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru.

Melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penambahan penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan diaturnya masalah kekerasan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945". Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai ranah, baik domestik maupun publik.

2. Pendekatan Perilaku

Program yang digagas Olweus maupun pendapat dari Federasi Guru telah menekankan pentingnya guru dan siswa belajar menyikapi perilaku kekerasan untuk mengantisipasinya. Secara konsisten menghindari penghukuman yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang negatif dan yang merusak apabila terjadi pelanggaran aturan, dan bertindak sebagai model yang dapat ditiru.

Ada komitmen nasional yang kuat dari pemerintah Indonesia sekarang ini untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan, termasuk perundungan di sekolah-sekolah. Upaya ini dilakukan dengan lebih menekankan pada perubahan norma sosial saat ini yang menerima, mentolerir, dan mengabaikan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.²⁷

Model Manajemen Pencegahan perundungan di SDIT Al Haraki

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dan juga berhubungan dengan usaha yang dijalankan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa-masa yang akan datang dan penentuan strategi/taktik yang tepat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pada suatu organisasi.

Mengenai masalah yang terjadi berkaitan dengan perilaku perundungan, SDIT Al Haraki membuat suatu aturan untuk memutus rantai kasus perundungan. Adanya program yang dibuat oleh pihak sekolah merupakan sebagai upaya untuk mencegah dan memutus rantai perilaku perundungan di lingkungan sekolah tersebut. Setiap

²⁷ Jacobsen KH Fleming LC, "Bullying among Middle-School Students In Low and Middle Income Countries", *Jurnal Health Promot Int.* 2010, Volume 25, h. 73-84.

program yang dibuat oleh sekolah harus disosialisasikan terlebih dahulu untuk menjelaskan peraturan yang berlaku dan penegakan hukuman yang telah disepakati.

Upaya yang dilakukan SDIT Al Haraki untuk mencegah terjadinya perilaku perundungan dan bagaimana cara menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah yaitu membuat program pencegahan perundungan secara *preventif* di lingkungan sekolah. Kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah membuat perencanaan terdiri atas peraturan yang akan ditetapkan dengan tujuan sasaran tindakan yang akan dicapai dan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Seperti halnya yang juga diungkapkan oleh wakil kepala sekolah SDIT Al Haraki bidang kesiswaan²⁸ yang menyatakan bahwa sebelum dimulainya tahun pelajaran baru para manajemen dan guru membuat perencanaan program-program kerja yang akan dilaksanakan kedepannya. Upaya preventif yang dilakukan SDIT Al Haraki membuat program pencegahan perundungan sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, menyenangkan dan ramah anak.

Gambar tersebut merupakan rancangan program BA divisi budaya yang dibuat untuk mengetahui tugas-tugas yang di emban oleh anggota unit organisasi siswa antara lain:

1. Sambut Pagi
2. Morning Motivasi
3. Piket Budaya
4. Budaya PHBS
5. Stop Bullying
6. Senam Pagi

Guru sebagai pembina unit organisasi siswa bertanggung jawab memberikan pembekalan materi kepada anggota siswa kelas 4. Sedangkan untuk kelas 5, pembina mengarahkan anggota siswa ikut andil dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.

b. *Organizing (Pengorganisasian)*

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Untuk itu, Kepala Sekolah SDIT Al Haraki membuat struktur penugasan yang kemudian bertanggung jawab terhadap program-program yang akan dijalankan di sekolah. Upaya sekolah dalam pencegahan perundungan yaitu dengan ditugaskannya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk membuat struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan perilaku perundungan

c. *Actuating (Pelaksanaan)*

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh, ada beberapa model program yang sudah dilaksanakan di SDIT Al Haraki Depok Jawa Barat dalam upaya pencegahan perilaku perundungan yaitu:

1. Program *Peaceful School* sebagaimana yang sudah dibahas pada bab 3 merupakan salah satu program yang akan di laksanakan di SDIT Al Haraki. *Peacefull school* adalah

²⁸ Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan; Ibu Agung Indri Lestari, S.Pd, pada tanggal 12 November 2020

sekolah yang damai. Sekolah yang memiliki suasana yang kondusif untuk belajar mengajar, memberikan jaminan suasana nyaman dan keamanan pada setiap komponen yang ada disekolah karena adanya kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan kebersamaan. Hal itu juga yang selalu ditekankan oleh yayasan akbar kepada setiap unit pendidikan yang ada dibawah naungannya, baik itu ditingkat *presschool*, SD, SMP, SMA. Khususnya di SDIT Al Haraki kepala sekolah juga menyampaikan pada saat briefing bersama guru-guru, pentingnya menciptakan lingkungan yang damai, aman, nyaman bagi peserta didik.

Dalam implementasinya program *peaceful School* ini tidak berjalan sesuai teori manajemen yang telah dibahas pada bab 3. Karena program ini masih berupa wacana dan belum ada tindakan secara terorganisir. Program ini tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas. Maka pelaksanaan program *peaceful school* tidak berjalan sesuai harapan yang disampaikan kepala sekolah. Padahal program ini menjadi salah satu upaya sekolah sebagai pencegahan preventif kasus perundungan yang terjadi dilingkungan sekolah.

2. *Student Handbook*, setiap siswa memiliki buku *Student Handbook* yang menjadi panduan siswa selama belajar di SDIT Al Haraki Depok. Buku tersebut sudah ditulis secara rinci mulai alur kegiatan siswa, seragam yang dipakai saat belajar, tata tertib dilingkungan sekolah, program pembinaan siswa dan lain sebagainya. Apabila siswa melakukan tindak *bullying* di *student Handbook* dijelaskan pada kredit point pelanggaran. Pada kredit point pelanggaran terbagi menjadi 3 tingkatan: 1) ringan, 2) sedang, 3) berat. Apabila siswa melakukan tindakan *bullying* tingkat ringan maka pelaku hanya diberi hukuman teguran lisan, apabila siswa melakukan tindakan tingkat sedang maka pelaku diberi hukuman berupa pelaporan ke orangtuanya dan tetap berada dikelas saat jam istirahat dan apabila siswa melakukan tindakan *bullying* tingkat berat maka pelaku diberi hukuman berupa pemanggilan orangtuanya dan berdiam dimasjid selama 3 hari. Secara perencanaan program ini terlaksana dengan baik, mulai pembagian buku masing-masing ke siswa kemudian diadakan sosialisasi oleh guru ke setiap kelas. Ada beberapa point dalam *student handbook* yang tidak berjalan secara efektif. Misalnya tentang aturan keterlambatan siswa yang hanya diberikan teguran padahal kalau didalam *student handbook* siswa diberikan sanksi merapihkan rak sepatu selama sepekan.

Keterlibatan orang tua siswa juga penting karena mereka akan ikut memantau aturan-aturan yang sudah ditulis di *student handbook*. Untuk itu sekolah harus memberikan sosialisasi terhadap orang tua siswa sebagai bentuk kesepakatan bersama. Program yang telah dibuat tentunya ada evaluasi, *student handbook* seharusnya ada evaluasi yang dilakukan oleh manajemen sekolah. Selama peneliti bergabung di SDIT Al Haraki Depok *student handbook* belum ada pembahasan tentang evaluasinya.

Student handbook ini tidak membahas secara khusus mengenai tindak perilaku perundungan. Jadi, menurut peneliti pemahaman tentang bahaya yang terjadi akibat perundungan masih kurang dimengerti oleh siswa-siswi SDIT Al Haraki. Mengadakan sosialisasi keseluruhan masyarakat sekolah khusus membahas tentang perundungan belum pernah dilakukan di SDIT Al Haraki. Jadi, menurut peneliti hal ini menjadi permasalahan karena perundungan menjadi hal yang tabu.

3. Unit Organisasi Siswa Bintang Alki divisi budaya, program pencegahan perundungan di SDIT Al Haraki selanjutnya adalah kelompok teman sebaya. Kelompok ini beranggotakan siswa-siswi kelas 4-5 yang dinamakan organisasi Bintang Alki Divisi Budaya. Lingkungan teman sebaya dapat ditemukan berbagai elemen yang dapat membentuk kepribadian seseorang, karena dimasa sekarang teman sebaya menjadi sosok yang ditiru oleh siswa dan ia sangat senang apabila bisa masuk kedalam kelompok tersebut. Teman sebaya yang mempunyai perilaku baik dapat membentuk kepribadian yang baik bagi siswa yang lainnya. Sebaliknya, apabila teman sebaya yang mempunyai perilaku kurang baik maka bisa membawa pengaruh kurang baik bagi siswa lainnya. Kelompok teman sebaya mempunyai fungsi memberikan sosialisasi terhadap siswa yang lainnya mengenai apa itu *bullying*, macam-macam *bullying*, dan dampak yang terjadi bagi pelaku dan korban *bullying*.

Program sekolah dalam upaya pencegahan perundungan melalui teman sebaya yang diberi nama organisasi siswa bintang alki divisi budaya. Apabila dilihat dari teori manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan dan evaluasi, program ini sudah sesuai prosedur. Namun, peneliti menemukan program ini dilaksanakan saat memasuki semester 2 saja sehingga pemahaman tentang bahaya perundungan tidak tersampaikan secara maksimal dan kampanye *anti-bullying* yang dilakukan oleh organisasi siswa divisi budaya masih belum menjangkau seluruh siswa-siswi SDIT Al Haraki Depok. Anggota organisasi ini menurut peneliti juga harus dibekali metode berdiskusi tentang kasus yang diartikan sebagai rangkaian dalam pembelajaran yang menekankan kepada bagaimana proses apabila ada masalah perundungan yang terjadi secara ilmiah dengan tujuan untuk dapat menjawab pertanyaan saat pengambilan keputusan.

Salah satu kegiatan siswa-siswi anggota unit organisasi bintang alki divisi budaya. Mereka sedang melakukan sosialisasi dengan bahaya yang terjadi apabila kita melakukan perundungan terhadap temannya. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya sekolah untuk pencegah terjadinya perilaku perundungan melalui pendekatan teman sebaya.

4. *Teacher on Duty*, peran guru sebagai pendidik tidak hanya bertanggungjawab pada nilai akademis saja, akan tetapi memiliki tanggungjawab dalam membentuk perilaku dan karakter siswa. Selain itu juga guru ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan perilaku perundungan secara preventif. SDIT Al Haraki mempunyai program *teacher on duty* (piket guru) dibawah koordinasi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian waka kesiswaan membuat jadwal guru yang akan bertugas disetiap harinya. Guru melaksanakan tugasnya mulai dari kedatangan siswa sampai kepulangan siswa dengan tujuan sekolah memberikan kenyamanan, keamanan bagi peserta didik. Tentunya program tersebut sebagai upaya pencegahan tindak *bullying* yang dilakukan siswa selama berada di lingkungan sekolah.

Dari hasil wawancara dengan Guru level 5 dan 6²⁹ dan observasi yang dilakukan peneliti menemukan, guru piket banyak mengalami berbagai hambatan sehingga dalam pelaksanaan tugas piket berjalan tidak maksimal sehingga kasus-kasus yang terjadi siswa saat istirahat khususnya tidak diketahui oleh pihak sekolah. Kasus

²⁹ Wawancara dengan Guru level 5 dan 6; Ibu Neng Yulia Sugandi, S.Pd dan Ibu Sendy Lindasari, S.Pd, pada tanggal 12 November 2020

yang tidak diketahui akan menimbulkan dampak bagi kenyamanan peserta didik di lingkungan sekolah. Sehingga perubahan siswa yang menjadi korban *bullying* diketahui terlebih dahulu oleh orangtunya.

Menurut peneliti kalau dilihat dari segi teori manajemen program ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan program tersebut. Hanya saja kurangnya komunikasi antara pihak guru piket dan pihak manajemen tidak terjalin secara solid. Double job tugas ini yang menjadikan guru tidak maksimal saat melaksanakan tugasnya sebagai guru piket. Di sini manajemen dalam hal ini waka kesiswaan selaku koordinator piket guru harus mengadakan evaluasi dan solusi supaya program ini berhasil dilaksanakan.

5. Bimbingan dan Konseling, program selanjutnya adalah bimbingan dan konseling, ini merupakan salah satu upaya sekolah dalam pencegahan perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan SDIT Al Haraki Depok. Dalam struktur organisasi bimbingan konseling ini dibawah koordinasi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Adapun tugas pokok bimbingan dan konseling yaitu melaksanakan fungsi pemahaman, pencegahan, pemeliharaan dan pengembangan dalam setiap layanan. Bimbingan konseling ini juga sudah menjadi bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Dalam implementasi bimbingan dan konseling banyak program yang harus disusun dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Program bimbingan dan konseling dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan program pembelajaran yang akan dilaksanakan paling utama mempunyai kaitan dengan kebutuhan siswa. Program-program ini harus disusun supaya dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Ciri-ciri program bimbingan konseling yang efektif dan efisien dalam bukunya Susanto antara lain:

- a) Program disusun dan dikembangkan sesuai kebutuhan siswa.
- b) Kegiatan bimbingan disusun menurut skala prioritas yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas
- c) Program bimbingan dan konseling harus memiliki tujuan yang ideal, tetapi harus realitas dalam pelaksanaannya
- d) Mempunyai fasilitas yang diperlukan
- e) Penyesuaian program disesuaikan di lingkungan pendidikan yang bersangkutan
- f) Memberikan pelayanan keseluruhan siswa
- g) Mempunyai peranan penting dalam menghubungkan dan memadukan antara pihak sekolah dan masyarakat
- h) Berlangsung sesuai dengan proses penilaian diri, baik mengenai program maupun kemajuan pengetahuan, ketrampilan dan bagaimana sikap dari para petugas pelaksana.

Bagaimana program bimbingan dan konseling ini dalam upaya pencegahan perilaku perundungan yang terjadi di SDIT Al Haraki. Program ini tidak terlalu fokus ke permasalahan *bullying* karena tugas guru bimbingan konseling adalah melayani dan menangani semua permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Tetapi menurut peneliti, guru bimbingan dan konseling berperan aktif juga mengkampanyekan *anti-bullying* di lingkungan sekolah sebagai bentuk kepedulian tentang dampak bahaya yang terjadi apabila perundungan itu dibiarkan terjadi.

d. *Controlling* (Pengendalian)

Controlling merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh seorang *controller* (pengawas). Pengawasan dilakukan untuk menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, pada setiap tahap-tahap kegiatan perlu dilakukan pengawasan. Sebab apabila terjadi penyimpangan akan lebih cepat melakukan koreksi atau perbaikan.

Program yang telah dibuat oleh SDIT Al Haraki tentunya diperlukan pengawasan, sebagai bentuk pertanggung jawaban apakah program yang sudah direncanakan berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan. Program yang sudah dibuat tentunya ada pengawasan baik itu dari wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kepala sekolah, direktur pendidikan, sampai ke ketua yayasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru BK³⁰, ia menyampaikan bahwa, bentuk pengawasan yang dilakukan guru dalam pencegahan perundungan mulai dari keaktifan guru kelas menanyakan keadaan siswanya. Apakah ada siswa yang di *bully* temannya ataupun ada siswa yang melihat temannya menjadi korban *bullying*. Selain guru kelas yang ikut bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan siswa saat berada dilingkungan sekolah guru BK juga melakukan observasi kesetiap guru kelas, hal ini dilakukan untuk mengetahui mengenai keadaan siswa apakah ada kasus perundungan yang terjadi dan untuk mencari strategi penanganan apabila ada siswa yang menjadi korban perundungan. Program yang sudah dibuat tentunya ada pengawasan baik itu dari wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kepala sekolah, direktur pendidikan, sampai ke ketua yayasan.

Seperti yang disampaikan ibu Neng Yulia Sugandi, S.Pd selaku wali kelas 5, beliau mengatakan, "*bentuk pengawasan dari wali kelas misalnya, menanyakan keseluruhan siswa dikelas apakah ada siswa yang mendapatkan gangguan dari temannya*".³¹ Selanjutnya Ibu Iffah Ufairroh, S.Psi., M.Psi. beliau mengatakan, "*bentuk pengawasan yang dilakukan oleh guru BK misalnya, observasi tim BK dilakukan di kelas masing-masing dengan tujuan pelaporan kasus siswa dan perkembangan siswa setiap bulannya*".³²

Mengenai pengendalian (*controlling*) apa yang dilakukan oleh guru menurut peneliti sudah sesuai dengan teori manajemen. Karena pengawasan yang dilakukan disetiap program kegiatan merupakan bentuk tanggung jawab oleh bagi manager. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana. Observasi yang dilakukan oleh tim BK sudah menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan dan sudah terjadwal. Sehingga guru kelas ada waktu tersendiri untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi terhadap siswanya. Tim BK juga membuat laporan kasus yang terjadi terhadap siswa disekolah selama setahun.

³⁰ Wawancara dengan Guru BK (Bimbingan dan Konseling); Ibu Astika Putri, S.Psi pada tanggal 15 November 2020

³¹ Wawancara dengan Guru level 5 dan 6; Ibu Neng Yulia Sugandi, S.Pd dan Ibu Sindy Lindasari, S.Pd, pada tanggal 12 November 2020

³² Wawancara dengan Guru BK (Bimbingan dan Konseling); Ibu Iffah Ufairroh, S.Psi. M.Psi, pada tanggal 15 November 2020

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang model manajemen pencegahan perundungan di SDIT Al Haraki Depok Jawa Barat. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini menemukan bahwa; Perundungan fisik yang ada dan terjadi di SDIT Al Haraki Depok Jawa Barat seperti mendorong temannya, melampar sandal, memukul, mengganggu. Yang kedua adalah jenis perundungan verbal, misalnya seperti memanggil nama dengan panggilan nama orang tuanya, dan bahkan dalam kasus perundungan verbal yang terjadi tersebut dilakukan oleh seorang oknum guru sendiri dengan panggilan meledek;

Ada dua model manajemen pencegahan perundungan yang dilakukan oleh SDIT Al Haraki Depok Jawa Barat, yaitu: a. Dengan cara menciptakan banyak program baru bagi siswa-siswi. Seperti: 1) Program *Peaceful School* sebagaimana yang merupakan salah satu program yang akan di laksanakan di SDIT Al Haraki. 2) Program sekolah dalam upaya pencegahan perundungan melalui teman sebaya yang diberi nama organisasi siswa bintang Alki Divisi Budaya. b. Dengan membuat peraturan-peraturan yang tertuang dalam *Student Handbook* yang menjadi panduan siswa selama belajar di SDIT Al Haraki Depok. Buku tersebut sudah ditulis secara rinci mulai alur kegiatan siswa, seragam yang dipakai saat belajar, tata tertib dilingkungan sekolah, program pembinaan siswa dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aceng Muhtaram Mirfan. (2016). "Manajemen Perubahan Pada Satuan Pendidikan Dasar", *Jurnal Administrasi Pendidikan XXIII* (1): 62.
- Bashori, Bashori. (2018). "Manajemen Konflik di Lembaga Pendidikan", *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* 2 (2)
- Juamarniti, Juamarniti, dkk. (2019). "Analisis Peran Manajemen Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di SMKN 7 Bone", *JURNAL MAPPESONA* 2 (1)
- Bashori, Bashori. (2016). "Manajemen Konflik Di Tengah Dinamika Pondok Pesantren Dan Madrasah." *Muslim Heritage* 1 (2): 353-370.
- Fleming LC, Jacobsen KH. (2010). Bullying among Middle-School Students In Low and Middle Income Countries. *jurnal Health Promot Int.* 25: 73-84
- Hari Harjanto Setiawan. (2018). "Pengembangan Sistem Peringatan Dini Perundungan pada Pelajar di Kota Pangkal Pinang", *Jurnal SOSIO KONSEPSIA* 7 (02): 64.
- Kurniasari, A. dkk. (2017). Prevalensi Terhadap Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia, *jurnal SOSIO KONSEPSIA* 6 (03).
- Kusumandari, Puji, and Nur Rohmah. (2018). Manajemen ekstrakurikuler Hizbul Wathan untuk membentuk karakter kepemimpinan siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Madrasah* 3 (1): 267-278.

- Lukitasari, Depi, and Intan Yuliani Pratiwi. (2021). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dan Penggunaan Gadget Dengan Perilaku Bullying Pada Remaja. *Jurnal Sehat Masada* 15 (2): 313-326.
- Sari, Popy Puspita, Sumardi Sumardi, and Sima Mulyadi. (2020). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini. *Jurnal PAUD Agapedia* 4 (1): 157-170.
- Stephanus, Turibius. (2018). Pola asuh yang efektif untuk mendidik anak di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 10 (2): 143-161.
- Sudarsana, I. Ketut. (2018). "Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Desentralisasi Pendidikan Nasional", *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya* 1 (1).
- Suyono, H. & Suryanto, "Pengembangan Model Sistem Peringatan Dini Konflik Menggunakan Prediktor Identitas Sosial", *Humanitas Jurnal Psikologi Indonesia*, 14 (1): 66-77.
- Verlinden, S.H.M dan Thomas, J. "Risk Factors In School Shootings" *Clinical Psychology Review* 20 (1): 6.
- Yusuf, Husmiati and Adi Fahrudin. (2012). Perilaku bullying: asesmen multidimensi dan intervensi sosial. *Jurnal Psikologi Undip* 11 (2): 3-5.
- Sucipto. (2012). Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya, *Jurnal Psikopedagogia* 1 (1): 5.
- Saraswati, Rika dan V. Hadiyono, *Tata Tertib Sekolah yang Responsife Antikekerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang*, Penelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing, 2015, di akses pada tanggal 12 Desember 2020.

Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Alang M., Sattu. *Kesehatan Mental dan Terapi Islam*, Makassar: Berkah Utami, 2006.
- Henry L. Sisk. *South Western, Principles of Management*, Cincinnati Ohio: Philippine Copyright, 1969.
- Jones, V. dan Jones, L. *Manajemen Kelas Komprehensif*, Edisi 9, Terj. Intan Irawati. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Onisimus Amtu. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wiyani, Novan Ardy, *Save Our Childern from School Bulling*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Undang-undang

- Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan." (2021).

Indonesia, Undang-Undang Republik, and R. I. Undang-Undang. "Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *Jakarta: Sinar Grafika* (2003).

Amandemen UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. (2015).

Internet

Hartik, Andi. "84 Persen Siswa Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah", diakses pada 13 Novenber 2020. <https://regional.kompas.com/read/2016/11/29/16005801/84>

Imran, Saiful. "Ciri Program BK Yang Efektif dan Efisien", Diakses Pada Hari Minggu 24 Januari 2021. <https://ilmu-pendidikan.net/bimbingan-dan-konseling/ciri-program-bk-yang-efektif-dan-efisien>

Student Handbook SDIT Al Haraki. diakses pada 20 Novenber 2020. www.alharaki.sch.id